



PENDAMPINGAN DALAM MEMBUAT SPT BADAN PADA PT NAYAKA ARTHA SADANA

Nataherwin¹, Riska Patricia Angelika² dan Elisa Tio³

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: nataherwin@fe.untar.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: riska.125239103@stu.untar.ac.id

³Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: ellisa.125239101@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

One of the tax obligations of SMEs is to file annual tax returns both as a corporate taxpayer and as an individual taxpayer. PT Nayaka Artha Sadana, as one of the MSMEs with a corporate NPWP, is required to file an annual corporate income tax return. PT Nayaka Artha Sadana employees are known to be unable to calculate the annual corporate income tax. This makes the online payment and filing of the CIT return difficult. Therefore, there is a need to provide assistance to the employees to be able to prepare a corporate income tax return. The purpose of this activity is to educate employees to have sufficient understanding of how to prepare or file the Corporate SPT in order to fulfill their tax obligations and provide precise and accurate information to the Tax Office. This activity starts with the preparation phase, i.e. the preparation of the data, then proceeds to the implementation phase and ends with the reporting phase. The community service team provided assistance through presentations, questions, and practice in the calculation and preparation of the annual corporate income tax return, starting with an explanation of income tax for corporations, preparation of the necessary document data, and simulating the calculation of income tax. This mentoring activity can improve taxpayers' understanding of taxes and benefits, which will encourage them to file and pay taxes voluntarily and on time.

Keywords: Corporate Taxpayers, Annual Corporate SPT, SPT Reporting

ABSTRAK

Salah satu kewajiban pajak UMKM adalah melaporkan SPT tahunan baik sebagai WP badan maupun sebagai WP orang pribadi. PT Nayaka Artha Sadana selaku sebagai salah satu UMKM yang memiliki NPWP badan, diwajibkan untuk menyusun SPT Tahunan PPh Badan. Karyawan PT Nayaka Artha Sadana, diketahui masih belum bisa menghitung PPh Badan tahunan. Hal ini menyebabkan pembayaran dan pelaporan SPT Badan secara online menjadi sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan kepada karyawan untuk dapat membuat SPT Badan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada karyawan agar memiliki pemahaman yang cukup mengenai pembuatan atau penyusunan SPT Badan agar dapat memenuhi kewajiban pajak mereka dan memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada kantor pajak. Kegiatan ini dimulai dari tahap persiapan, penyiapan data-data, lalu dilanjutkan ke tahap pelaksanaan dan diakhiri dengan tahap pelaporan. Tim pengabdian masyarakat melakukan pendampingan dengan menggunakan presentasi, pertanyaan, dan praktik perhitungan dan penyusunan SPT Tahunan Badan, dimulai dengan penjelasan tentang pajak penghasilan bagi badan, penyiapan data dokumen yang diperlukan, dan simulasi penghitungan pajak penghasilan. Kegiatan pendampingan ini dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pajak dan keuntungan yang akan mendorong mereka untuk melaporkan dan membayar pajak secara sukarela dan tepat waktu.

Kata Kunci: WP Badan, SPT PPh Badan, Pelaporan SPT

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Negara terbesar bersumber dari pajak. Hampir semua negara di dunia, sebagian besar kebutuhan pendapatan untuk pembangunannya dipenuhi dari sektor perpajakan. Pajak merupakan ujung tombak sumber utama pendapatan negara, karena pemerintah memainkan peran sentral dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Aizenman, Jinjark, Kim, & Park, 2019). Wajib pajak mengharapkan imbalan langsung ketika langsung ketika membayar pajak, seperti pelayanan publik dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah (Mangoting & Ganis, 2015).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu penggerak ekonomi terbesar di Indonesia sejauh ini. UMKM secara statistik menyumbang 60,5% dari PDB nasional, menyerap 97% dari tenaga kerja dan 99% dari lapangan kerja (Ayem & Hijayanti, 2022). Jumlah UMKM di Indonesia secara keseluruhan mencapai 64 juta unit usaha yang tersebar di berbagai daerah (Tenri & Resinta, 2023).

Ada beberapa pelaku UMKM yang telah memiliki izin usaha dan NPWP mengakui bahwa mereka tidak mengetahui dan memahami ketentuan UMKM sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak. Pembayar pajak dapat menjadi lebih patuh jika pemahaman mereka tentang perpajakan meningkat (Putra, 2020). Tidak semua wajib pajak UMKM mengetahui dan memahami ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan sehingga sehingga diperlukan banyak sosialisasi dan pendampingan.

Salah satu kewajiban pajak UMKM dalam bentuk usaha badan adalah menghitung, membayar serta melaporkan SPT tahunan baik sebagai WP badan. SPT tahunan badan sendiri digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan disertai perhitungannya, juga untuk melaporkan harta, kewajiban dan kepemilikan usahanya. SPT badan hanya menggunakan satu formulir, SPT 1771, sedangkan SPT orang pribadi memerlukan lebih dari satu formulir. Badan usaha yang dimaksud adalah berbentuk PT, CV, Usaha Dagang, Organisasi, dan Yayasan Perkumpulan diberlakukan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT setiap tahunnya. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, pemerintah kembali mendorong UMKM dengan memberikan insentif pajak khusus bagi mereka. Namun, tarif tersebut hanya berlaku untuk badan usaha berbentuk CV selama empat tahun dan untuk badan usaha berbentuk PT selama tiga tahun sejak berdirinya (Risa & Sari, 2021).

Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang pajak dan manfaatnya, mereka cenderung melaporkan dan membayar pajak secara sukarela. Jika mereka tidak memahami pajak, mereka akan dianggap sebagai kelompok wajib pajak yang tidak patuh (Mustofa et al., 2016). Sangat penting untuk memahami pajak agar pajak dapat dibayar dan menjadi pendapatan bagi pemerintah dan daerah.

PT Nayaka Artha Sadana merupakan usaha baru sebagai UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak badan, maka PT Nayaka Artha Sadana berkewajiban mengisi dan melaporkan SPT Tahunan badan yang jatuh tempo di tanggal 30 April setiap tahunnya. Untuk menjadi wajib pajak yang baik, PT Nayaka Artha Sadana harus melaporkan dan membayar pajak kepada negara secara tepat waktu. Berdasarkan pembicaraan dengan pimpinan PT Nayaka Artha Sadana, diketahui masih belum bisa menghitung PPh Badan tahunan. Hal ini menyebabkan pembayaran dan pelaporan SPT Badan secara online menjadi sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu diperlukan pendampingan kepada karyawan untuk dapat membuat SPT Badan. Diharapkan bahwa lebih banyak orang akan memahami pajak dengan bantuan. Ini juga akan membantu wajib pajak badan memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara.

Permasalahan

Berdasarkan analisis situasi di atas, masalah yang paling penting bagi karyawan PT Nayaka Artha Sadana adalah kurangnya pemahaman karyawan tentang perpajakan, terutama tentang pembuatan atau penyusunan SPT Badan, serta cara mendaftarkan, menghitung, menyerahkan, dan melaporkan pajak. Dimana prioritas permasalahan mitra kami adalah:



1. Bagaimana cara mendapatkan EFIN badan?
2. Bagaimana cara download E form SPT 1771?
3. Bagaimana mempersiapkan data pendukung untuk pengisian SPT 1771?
4. Bagaimana cara mengisi SPT 1771?
5. Bagaimana cara melaporkan SPT 1771?

Untuk itu kami akan mengadakan pendampingan mengenai topik perpajakan dimana akan berfokus pada pembuatan atau penyusunan SPT Badan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada karyawan agar memiliki pemahaman yang cukup mengenai pembuatan atau penyusunan SPT Badan agar dapat memenuhi kewajiban pajak mereka dan memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada kantor pajak, sehingga dapat membantu menghindari potensi denda atau masalah hukum yang mungkin dapat timbul akibat adanya pelanggaran pajak.

Solusi Mitra

Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu sebagai berikut:

- Memberikan petunjuk tentang cara merespons SPT Badan dengan baik dan jelas
- Memberikan petunjuk tentang cara mempersiapkan data pendukung yang diminta untuk pengisian SPT.
- Membantu mendapatkan EFIN badan.
- Mengajarkan cara mengisi SPT 1771.
- Mengajarkan cara melaporkan SPT 1771.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara *offline* di sunrise jl palapa raya no 1 dan acara ini dikemas dalam bentuk sharing. Materi sosialisasi disajikan dalam bentuk *power point* dan diikuti oleh seluruh karyawan PT Nayaka Artha Sadana yang berjumlah 6 orang.

Acara sosialisasi ini diadakan secara offline di Sunrise Jalan Palapa Raya Nomor 1, dan dikemas dalam bentuk berbagi. Semua enam karyawan PT Nayaka Artha Sadana melihat presentasi PowerPoint tentang materi sosialisasi. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam empat tahap. Kami pergi ke PT Nayaka Artha Sadana untuk berbicara tentang topik SPT dengan pemilik PT Nayaka Artha Sadana pada tahap pertama. Tahap kedua adalah persiapan, di mana kami membuat materi dan data pendukung untuk presentasi PowerPoint. Tahap ketiga, tahap pelaksanaan, dilakukan pada tanggal 22 April 2024. Ini adalah tahap terakhir, di mana kami perlu membuat laporan akhir tentang kegiatan PKM yang telah diselesaikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap bisnis ingin karyawannya memahami perpajakan sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban pajak mereka. PT Nayaka Artha Sadana juga berharap karyawan memahami pentingnya SPT Badan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, menemukan masalah perpajakan secara lebih dini, dan menghindari interpretasi yang salah. Saat karyawan menerima SPT, mereka dapat menggunakan pengetahuan ini untuk menyiapkan informasi tambahan yang dibutuhkan dan memberikan tanggapan yang tepat. Semua karyawan toko menganggap penting untuk mengikuti kegiatan penyuluhan perpajakan.

Ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan saat mengisi SPT tahunan badan. Berkas umum yang wajib dipersiapkan terlebih dahulu ketika mengisi SPT tahunan badan, antara lain:

- SPT masa PPN dalam satu tahun pajak yaitu dari Januari hingga Desember 2023

- Faktur pajak masukan dan keluaran dalam satu tahun pajak.
- SPT masa pasal 21 dari Januari hingga Desember 2023.
- Bukti pemotongan PPh pasal 23 yang diterima dalam 1 tahun pajak
- Bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Berkas ini disertakan jika termasuk wajib pajak berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018.
- bukti pembayaran PPh pasal 25.
- Bukti pembayaran atas STP pajak penghasilan pasal 25 dalam waktu satu tahun pajak.
- Laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (Neraca) dan juga perhitungan koreksi fiskal.

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada surat yang memberikan informasi mengenai pajak. Dokumen ini dibuat dengan tujuan melaporkan data perpajakan kepada pihak berwenang pajak di Indonesia. Formulir SPT harus diisi dan dikirim oleh Wajib Pajak (WP), baik individu maupun perusahaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) berisi data yang berkaitan dengan pendapatan, pengurangan pajak, tugas pajak, dan aspek lain yang relevan dengan jenis pajak yang dinyatakan. Surat Pemberitahuan Tahunan juga memuat rincian mengenai jumlah pendapatan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak selama periode pajak tertentu, beserta jumlah pajak yang harus dibayarkan atau sudah dipotong. Bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan yang wajib diisi bergantung pada status perpajakan dan jenis usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Ada beberapa bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) yang biasanya muncul seperti SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), SPT Masa Pajak Pendapatan, SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SPT Pajak Penghasilan Pasal 23, dan sejenisnya. Pengisian SPT harus dilakukan secara teliti dan akurat sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Konsekuensi dari keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam mengisi dan menyampaikan SPT adalah adanya sanksi administratif atau denda yang akan dikenakan oleh pihak berwenang dalam bidang pajak. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, WP harus memahami tanggung jawab mereka terkait pembayaran pajak dan menyampaikan data dengan akurat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Teks tersebut menjelaskan mengenai cara melaporkan SPT Badan dengan cara yang efektif dan terperinci baik secara lisan maupun tulisan. Penjelasan yang mendetail juga diberikan mengenai persiapan data pendukung, seperti menyiapkan faktur pembelian dan meminta serta memverifikasi kecocokan data. Pengisian e-SPT Tahunan PPh badan akan dilakukan melalui aplikasi DJP Online.

Berikut tahapan langkah-langkah dalam membuat SPT Tahunan Badan:

1. Mengisi Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan
Setelah menyiapkan beberapa dokumen untuk lapor SPT Badan, Anda juga harus mengisi transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan yang ada.
2. Mengisi Lampiran Khusus
Lampiran khusus yang harus diisi dalam pelaporan surat pemberitahuan pajak badan.
3. Mengisi Lampiran Utama
Setidaknya ada enam lampiran utama formulir SPT Badan 1771 ini, yakni formulir SPT 17771-I hingga Formulir 1771-VI yang memuat informasi terkait wajib pajak badan dan harus diisi.

Untuk PT Nayaka baru mulai beroperasi di bulan April 2023, sehingga di tahun 2023 baru 9 bulan berjalan dan omset di tahun 2023 adalah Rp 247.500.000 masih dibawah batasan Rp 500.000.000 yang tidak kena pajak. Dengan demikian, untuk tahun 2023, PT Nayaka belum dikenakan PPh final UMKM. Selain itu, kegiatan pendampingan ini dapat meningkatkan

pemahaman wajib pajak tentang pajak dan keuntungan yang akan mendorong mereka untuk melaporkan dan membayar pajak secara sukarela (Zahara dkk., 2023). Kegiatan selama pendampingan di dokumentasi dalam Gambar 1 dan 2. Hasil kuisisioner ada pada Gambar 3.

Gambar 1

Foto Dokumentasi Presentasi



Gambar 2

Foto Pendampingan PKM



Gambar 3

Hasil Kuesioner Dari Para Peserta

Pertanyaan Kuesioner	Hasil
1. Apakah materi yang disajikan telah sesuai dengan ekspektasi anda?	Ya =100% Tidak= 0
2. Apakah kegiatan pendampingan ini sangat membantu?	Ya =100% Tidak= 0
3. Topik pelatihan apa yang Anda harapkan untuk kami berikan pada pelatihan selanjutnya?	Akuntansi = 50% PPh 21 =50%

4. KESIMPULAN

Pendampingan ini dirasakan bermanfaat untuk para karyawan khususnya karyawan PT Nayaka Artha Sadana, agar para karyawan dapat memiliki pemahaman yang cukup untuk membuat SPT Badan. Pendampingan ini juga dapat membantu DJP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya. Mengingat usaha ini sebagai salah satu UMKM yang pasti memerlukan pengisian SPT lainnya seperti PPh pasal 21 dan pasal 23, maka untuk pelatihan lebih lanjut bisa dilakukan pendampingan atas pengisian SPT lainnya.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan pimpinan dan berkatnya, kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala. Sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian masyarakat ini tepat waktu. Kami juga berterima kasih kepada PT Nayaka Artha Sadana yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk mengadakan kegiatan ini.

REFERENSI

- Aizenman, J., Jinjark, Y., Kim, J., & Park, D. (2019). Tax Revenue Trends in Latin America and Asia: A Comparative Analysis. *Emerging Markets Finance and Trade*, 55(2), 427–449. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1527686>
- Ayem, S., & Hijayanti, N. (2022). the Effect of Tax Incentives on Financial Performance of Micro, Small, and Medium Enterprises During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 6(1), 75–82. <https://doi.org/10.26618/profitability.v6i1.6955>
- Mangoting, Y., & Ganis, E. (2015). Developing a Model of Tax Compliance from Social Contract Perspective : Mitigating the Tax Evasion. 211(September), 966–971. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.128>
- Mustofa, F. A., Kertahadi, & R, M. M. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak USaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1). perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- Putra, A. P. (2020). Antecedents Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah. 15(1), 71–90.
- Risa, N., & Sari, M. R. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JRAK*, 20-37. Retrieved from <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/2430/1827>
- Tenri, G., & Resinta, S. (2023). Job Creation Perppu supports revival of MSMEs in Indonesia. <https://en.antaranews.com/news/275283/job-creation-perppu-supports-revival-of-msmes-in-indonesia>
- Zahara, I., Syah, M. E., & Mubarrak, Z. (2023). Pendampingan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Melalui DJP Online pada Klinik IDI Pajangan bantul. *JPkMN*, 1110-1117.